



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Raya Tubei Muara Aman - Argamakmur

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR        TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang        : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat        : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei  
Pada tanggal : 2019

Kepala,  
  
*Wuwun Mhiza*  
WUWUN MHIZA, SE. MT  
NIP. 19700610 200212 1 003

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah daerah berdasarkan SAP dan Meningkatnya penerimaan daerah dari semua sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Program administrasi perkantoran	100%	4.539.838.160
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	692.196.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya komunikasi, air, dan listrik	12 Bulan	325.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	275.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelolaan keuangan dan barang	12 Bulan	919.560.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan di BKD	12 Bulan	477.332.160
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	360.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan, penggandaan dan foto copy	12 Bulan	450.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Suku cadang listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	100.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum aparatur	12 Bulan	640.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan	300.750.000
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>583.207.840</b>
	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	1 Keg	205.067.840
	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya di BKD	12 Unit Laptop, 6 Unit Printer 2 UNIT UPS	278.140.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	1 Kegiatan	100.000.000
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan di BKD Kabupaten Lebong</b>	<b>100%</b>	<b>152.000.000</b>
Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan di BKD Kabupaten Lebong	1 Tahun	152.000.000
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>416.650.000</b>
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya Laporan Keuangan Semester I dan II, LRA, dan Neraca (4 Laporan)	1 Kegiatan	92.600.000
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya dokumen Tepra BKD	12 Dokumen	68.300.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun BKD	1 Dokumen	52.850.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana hibah bansos di kabupaten lebong	8 Dokumen	149.000.000
Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategi SKPD	Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja, dan Lakip BKD	1 Dokumen	53.900.000
<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>Adanya aturan yg jelas dalam pengelolaan keuangan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.103.390.000</b>
Penyusunan standar satuan harga	Jumlah standar satuan harga	1 Dokumen	276.080.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya perda tentang APBD, Perbup tentang penjabaran APBD, Dokumen pelaksanaan anggaran	1 Tahun	215.810.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD perubahan, Perbup tentang penjabaran APBD perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan	5 Dokumen	119.460.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah laporan keuangan Unaudited, Raperda, Raperbup, Perda dan Perbup LKPD	5 Dokumen	310.800.000
Penyusunan sistem informasi penggajian	Jumlah daftar induk gaji dan rapel gaji OPD	1 Tahun	160.000.000
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual (seluruh OPD)	43 OPD	141.060.000
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Sosialisasi Transaksi non Tunai	1 Keg	127.910.000
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Frekuensi manajemen aset (kali)	1	181.260.000
Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah revaluasi aset/ barang daerah	5 Dokumen	114.190.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pemetaan Sumber-sumber Potensi PAD	100 Objek Pajak	128.280.000
Rekonsiliasi Belanja Daerah	Jumlah Laporan realisasi belanja OPD	1 Tahun	101.390.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana DAK dan Penyesuaian	Jumlah laporan penggunaan dana DAK dan Penyesuaian yg akurat	4 Laporan	212.050.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Aset Daerah	Jumlah laporan monev aset	20 Laporan	251.080.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Tersedianya monev penerimaan PAD pada setiap OPD pemungut	9 OPD	112.000.000
Penertiban Pajak dan Retribusi	Jumlah Laporan Pajak dan Retribusi di tiap kecamatan	12 Kecamatan	115.980.000
Penyusunan Laporan Aset Daerah	Jumlah laporan aset daerah	1 Tahun	45.000.000
Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak	Basis Data PBB-P2	30000 Objek Pajak	210.520.000
Rekonsiliasi Data Keuangan Daerah	Tersedianya kesesuaian dan sinkronisasi data keuangan OPD dengan data keuangan pemerintah daerah	1 Tahun	96.600.000
Penyusunan Sistem Informasi RKUD	Sistem informasi RKUD	1 Tahun	100.700.000
Pelaksanaan sidang majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi	Tertagihnya TGR	25 Kasus	83.220.000
<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen Rencana Program kegiatan Badan Keuangan daerah Kab. Lebong</b>	<b>100%</b>	<b>93.100.000</b>
Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan	3 Dokumen	93.100.000
<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Tersedianya SOP pada Badan Keuangan Daerah kabupaten Lebong</b>	<b>100%</b>	<b>55.600.000</b>
Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah SOP Badan Keuangan Daerah	150 SOP	55.600.000
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur dalam membangun sistim informasi kepegawaian dan menyusun instrumen analisis jabatan</b>	<b>100%</b>	<b>56.214.000</b>
Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Jumlah Dokumen Anjab dan ABK badan keuangan	1 Dokumen	56.214.000

Kepala,


  
**WUWUN MHEZA, SE. MT**
  
 NIP. 197106103002191001

Am 12. August 1914